

Tantangan Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Ekonomi: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dari Perdagangan dan Penyelundupan Manusia

Dwi Valentina Sihite¹, Alya Rachma², Nabila Amanda Pulungan³, Pebriana Asina Panjaitan⁴, Tiffany Laura Balqis⁵, Ulfa Fatimah⁶

¹⁻⁶Universitas Negeri Medan

E-mail: dwivlntinas@gmail.com¹, rachmaalya7@gmail.com², nabilaamandareal@gmail.com³, pebrianapanjaitan8@gmail.com⁴, tiffanybalqis29@gmail.com⁵, fatimahulfa40@gmail.com⁶

Abstract. *This research aims to analyze defense cooperation between Indonesia and Germany in weapons procurement. This research involves an analysis of the history of defense cooperation between the two countries, the types of weapons that have been purchased, and the political and military implications of this cooperation. The research method used is the historical study method, namely by reviewing the topic through historical evidence, both written and unwritten, as a reference source. The research results show that defense cooperation between Indonesia and Germany has a significant impact on Indonesia's defense capabilities, but also has political and diplomatic consequences that need to be considered. It is hoped that this research will provide better insight into the dynamics of international defense cooperation and bilateral relations between Indonesia and Germany.*

Keywords: *Cooperation, Defense, weapons procurement*

Abstrak. Kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam perspektif ekonomi dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia merupakan tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain perbedaan regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan, praktik perdagangan dan penyelundupan manusia, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, dan ketidakpastian politik dan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan perdagangan dan penyelundupan manusia. Selain itu, perlu juga adanya kerjasama dalam mengatasi ketidakpastian politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi kerja dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Kata Kunci: Kerjasama, Ekonomi, Pekerja Migran

PENDAHULUAN

Kerjasama bilateral antara dua negara sering kali menjadi tonggak penting dalam hubungan internasional, yang meletakkan dasar kokoh bagi pembangunan bersama dan pemeliharaan perdamaian. Malaysia dan Indonesia, sebagai dua negara bertetangga yang kaya akan sejarah dan beragam budaya, memiliki hubungan bilateral yang melibatkan aspek-aspek penting seperti perdagangan, politik, dan ekonomi.

Hubungan bilateral merupakan kegiatan yang saling menguntungkan antara dua negara. Kemitraan strategis sebagai pilihan baru dalam membangun hubungan bilateral saat ini dan saat ini. Sasaran strategis serupa menumbuhkan jaringan yang mendalam dan mendorong kolaborasi jangka panjang. Beberapa pendekatan akademis dalam mempelajari hubungan internasional

mempunyai argumen tersendiri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama bilateral. Kaum realis membuat argumen mendasar tentang anarki internasional global. Asumsi realistis bahwa kekuatan militer adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan mendorong negara untuk menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan ancaman eksternal (threatbalancing), hanya untuk memenuhi kepentingan keamanannya (Candra, September 2022).

Liberal institusional berpendapat bahwa negara-negara bekerja sama satu sama lain dan menciptakan lembaga-lembaga yang memudahkan negara-negara tersebut mewujudkan kepentingan publiknya, yang pertama berarti memenuhi kepentingan ekonominya. Kolaborasi terjadi dalam berbagai situasi. Kolaborasi dapat terjadi dalam banyak situasi yang tidak konsisten. Kebanyakan interaksi dalam bentuk kerjasama terjadi antara dua pemerintahan yang mempunyai kepentingan berbeda atau menghadapi permasalahan serupa.

Kerja sama antara pemerintah dua negara berdaulat untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan dua negara, seperti melalui negosiasi atau perjanjian, dianggap sebagai kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral mengacu pada hubungan yang saling mempengaruhi antara dua negara, atau hubungan yang saling menguntungkan yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara tetangga yang menjalin hubungan bilateral erat di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pada bidang ekonomi, kedua negara mempunyai hubungan yang saling menguntungkan, dimana Indonesia merupakan pemasok utama bahan baku dan Malaysia sebagai pasar ekspor utama. Serta kerjasama dalam hal ketenagakerjaan.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah berkomitmen untuk bekerja sama memerangi perdagangan manusia dan penyelundupan manusia (Marsyalindi, 2019). Kerjasama bilateral ini telah menghasilkan berbagai perjanjian antara lain: Perjanjian Kerjasama Bilateral Dalam Rangka Pemberantasan Perdagangan Orang, Perjanjian Kerja Sama Bilateral Dalam Rangka Penyelundupan Migran Imigrasi Ilegal, Pertemuan bilateral antara Menteri Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Malaysia tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Kerja sama bilateral ini telah membawa hasil positif dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia dan migrasi ilegal. Namun demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, antara lain: Kesenjangan peraturan hukum, Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar organisasi, Kurangnya kesadaran masyarakat (Syahputra, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian Deskriptif adalah salah satu yang menggambarkan karakteristik atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian satu ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi. Menurut Etna Widodo Muchtar (2000) yang menyampaikan bahwa penelitian dengan metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan gejala sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Penelitian deskriptif yaitu Jenis penelitian yang menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi.

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif berupa studi pustaka dimana penulis menggunakan buku-buku dan jurnal untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Atau sama dengan triangulasi dan dokumen yaitu pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mencari informasi yang lebih banyak.

PEMBAHASAN

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia di bidang pekerja migran telah menjadi bagian penting dalam hubungan kedua negara. Dari segi ekonomi, hubungan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia dan Malaysia. Pekerja migran Indonesia di Malaysia telah menjadi bagian penting dalam mesin perekonomian kawasan, membawa manfaat ekonomi yang saling menguntungkan. Indonesia telah lama menjadi salah satu pemasok utama pekerja migran di Malaysia, dengan jutaan pekerja Indonesia bekerja di berbagai sektor, termasuk konstruksi, perkebunan, manufaktur, dan jasa rumah tangga. Dalam hal ini, mereka tidak hanya mengembalikan pendapatannya ke Indonesia sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan beberapa sektor ekonomi di Malaysia. Meskipun kerja sama ini menawarkan manfaat ekonomi yang jelas, isu-isu terkait pekerja migran seperti upah rendah, perlindungan hak-hak pekerja, dan eksploitasi juga harus dipertimbangkan. Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia harus lebih diperluas untuk memastikan perlindungan penuh dan upah yang adil bagi pekerja migran, yang akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara.

1. Perdagangan dan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia

Desas-desus perdagangan perempuan Indonesia mulai dikenal luas pada Kongres Kedua Persatuan Wanita Indonesia (PPII) di Surabaya pada tahun 1930. Pada tahun 1930, Masyarakat Penghapusan Perdagangan Manusia didirikan pada konferensi kedua untuk memperkuat perjuangan melawan perdagangan manusia. wanita Kongres PPII. Perempuan dan Anak (P -4A). PPII menyadari adanya keterkaitan antara perdagangan perempuan dengan prostitusi dan kemiskinan.

Perdagangan manusia dan penyelundupan bukanlah isu baru di Indonesia, namun pada tahun 2008 isu ini menjadi fokus utama. Perdagangan manusia melanggar hak asasi manusia. Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan terhadap perdagangan manusia. Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, dimana teknologi yang canggih memudahkan terjadinya aktivitas perdagangan manusia. Ada lima faktor utama terjadinya perdagangan manusia, yaitu kejahatan ini terjadi karena mencari keuntungan yang besar; korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang mudah dibujuk; struktur masyarakat pada umumnya bersifat patriarki dan masih menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua (bawahan); Kesempatan kerja yang terbatas dan letak geografis Indonesia yang luas membuat pemberantasan kejahatan sulit dilakukan.

Perdagangan perempuan sering terjadi sehubungan dengan pengiriman tenaga kerja, khususnya pekerja perempuan. Banyak perempuan dan anak-anak yang dibawa dari satu tempat ke tempat lain, dari desa ke kota dan ke negara lain dengan berbagai cara ilegal tanpa persetujuan dan pemahaman atau sepengetahuan para korban. Mereka tertipu dengan janji pekerjaan bagus dengan gaji tinggi. Hal ini juga dilakukan untuk jual beli obat-obatan terlarang, pengemis, pekerja seks, buruh pabrik dan banyak pekerjaan lain yang mengeksploitasi mereka.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan dan Penyelundupan

Perdagangan adalah bagian dari dinamika kependudukan. Dalam hal ini, ada warga yang pindah secara sukarela dan terkadang membuka cabang karena terpaksa untuk menyelesaikan permasalahan warga. Perpindahan pekerja, baik sukarela maupun tidak, bukanlah fenomena baru.

Namun saat ini terdapat perbedaan antara perdagangan dan penyelundupan, yaitu migrasi antar negara. Fenomena lain yang muncul dalam arus migrasi ini adalah feminisasi (program migrasi yang terutama terjadi pada perempuan dan anak). Pekerjaan perempuan yang diperdagangkan bercirikan: kotor, bermartabat dan berbahaya atau kotor, tidak berharga dan

berbahaya.

Situasi ini berlanjut di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi. Selain itu, lapangan pekerjaan yang tersedia di negara tersebut tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang diinginkan. Dengan kata lain, lapangan kerja yang tersedia tidak memberikan harapan dan kehidupan yang lebih baik bagi kelompok ini. Pekerja migran tidak mengerti apakah mereka tidak menjalani prosedur yang ditentukan atau tidak. Mereka hanya mengetahui bahwa jika mereka mendapat tawaran pekerjaan di suatu negara dengan jumlah tertentu atau dengan kontrak tertentu, maka mereka akan dipekerjakan. Mereka kemudian menyadari bahwa mereka telah ditipu dan masuk ke negara lain tanpa tes saat masih di Malaysia.

Faktor-faktor tersebut di atas juga berkaitan dengan diskriminasi gender dalam keluarga dan masyarakat. Banyak perempuan yang melarikan diri dari ketidaksetaraan gender, terlalu banyak bekerja di rumah, atau dipaksa menikah oleh orang tua mereka. Dalam beberapa budaya Indonesia, perempuan tidak mendapat tempat (marginalisasi).

Selain kemiskinan, pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyelundupan dan penyelundupan pekerja migran. Rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka mudah percaya pada orang lain. Faktor lainnya antara lain menikah muda, mudah tertipu dengan janji, dan gaji tinggi. Terkadang orang tua beranggapan bahwa anak adalah sumber penghasilan dan membiarkan anaknya bekerja di Malaysia. Kebanyakan korban berasal dari Pulau Jawa dan pindah ke Malaysia untuk mencari pekerjaan.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata menyatakan perdagangan dan penyelundupan manusia disebabkan oleh empat faktor. Yaitu manfaat yang sangat besar dari perdagangan manusia, budaya (kesamaan bahasa, minat terhadap budaya asing, hubungan interpersonal, gaya hidup, dll), terbatasnya kesempatan kerja dan kondisi geografis Indonesia membuat pemerintah tidak mampu mengendalikan munculnya manusia. Penyelundupan Perdagangan Manusia dan Perdagangan Tenaga Kerja (Vivanews-Nasional -ILO).

Penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa aspek dan kriteria perdagangan manusia, yaitu:

1. Penyelundupan dan penyelundupan perempuan dan anak yang dijadikan pembantu rumah tangga atau pembantu rumah tangga.
2. Perdagangan perempuan dan anak serta perdagangan di tempat hiburan, klub malam, bar atau toko.

3. Perdagangan dan penyelundupan perempuan dan anak sebagai pekerja seks.
4. Pekerja migran.
5. Perkawinan kontrak untuk mempunyai anak.

3. Dampak Perdagangan dan Penyelundupan Manusia

Banyak dampak yang ditimbulkan akibat perdagangan dan penyelundupan. Di satu sisi mempunyai dampak psikologis, di sisi lain memberikan manfaat ekonomi. Selain itu, pekerjaan yang diperoleh pekerja migran ilegal melanggar hak asasi manusia karena pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan ilegal (ilegal). itu sebabnya mereka membenci pekerjaan mereka. Hal ini memaksa pengusaha untuk menutup pekerja ilegal dan selalu berhati-hati. Kombinasi dua faktor, pendorong dan penarik, menciptakan tenaga kerja yang murah dan tidak terlatih. Keadaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi di negara-negara berkembang dan maju.

Dampak lainnya adalah manfaat sosial-ekonomi, dimana kedua belah pihak, yaitu korban dan pemberi kerja, mendapatkan keuntungan secara materi, meskipun pekerjaan tersebut pada dasarnya tidak sah. Meski penyelundupan merupakan tindakan ilegal, namun korban tetap bisa menjalin kontak dengan kerabat di kampung halamannya bahkan mereka juga dapat mengirim uang.

4. Solusi untuk meminimalisir Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia

Memobilisasi kerja sama bilateral dalam penanganan insiden dan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia mendukung proses ratifikasi 20 perjanjian bilateral dan tujuh perjanjian multilateral, termasuk perjanjian dengan Malaysia. Pemerintah Malaysia dan Indonesia telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk memerangi perdagangan manusia warga negara Indonesia ke Sabah, Malaysia Timur. Indonesia dan Malaysia juga melakukan penyesuaian. Kepolisian Republik Indonesia (Pori) dan Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) sepakat untuk memperkuat kerja sama memerangi kejahatan lintas batas dan memantau kejahatan di wilayah perbatasan kedua negara. Indonesia dan Malaysia akan memperkuat kerja sama dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk terorisme dan perdagangan narkoba, melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU), dan memperkuat perbatasan bersama melalui kerja sama pertukaran informasi antara kepolisian Indonesia dan Malaysia. memantau. Komisi Perbatasan Malaysia – Indonesia). Kedua

negara sepakat untuk berbagi informasi yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Saat ini, Komisi Pembangunan Manusia Keuskupan Agung (AHDC), bekerja sama dengan Komisi Migrasi Katolik Internasional (ICMC) yang berbasis di Jenewa, sedang menyelidiki masalah perbudakan dan perdagangan manusia terhadap warga Indonesia, khususnya perempuan dan anak-anak, ke negara bagian Sabah, Malaysia. Kami menerapkan program tiga tahun untuk mengakhiri hal ini. Proyek ini dimulai pada tahun 2008 dan didanai oleh Biro Perdagangan Global Departemen Luar Negeri AS.

Perdagangan manusia dan penyelundupan bukanlah masalah yang mudah untuk diidentifikasi karena merupakan kejahatan yang dimulai dari tingkat akar rumput. Bahkan orang tua pun ikut terlibat dalam masalah ini. Karena hal ini dimulai dari kalangan akar rumput, masyarakat lokal memandang pengiriman tenaga kerja sebagai hal biasa, sehingga sulit untuk menentukan apakah pengiriman pekerja migran merupakan perdagangan manusia. Perdagangan manusia pertama kali diketahui ketika korban pulang kerja. Dalam keadaan seperti ini, sulit mengharapkan masyarakat luas untuk terlibat dalam pemberantasan perdagangan manusia. Ketidaktahuan masyarakat mengenai perdagangan manusia justru dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Terdapat kekhawatiran bahwa perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, jika tidak segera dihentikan, dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional dan sosial karena berdampak pada aspek integritas dan jati diri bangsa, sehingga melemahkan fondasi bangsa. dan kehidupan sosial.

Oleh karena itu, berbagai informan yang ditemui penulis sepakat bahwa perdagangan manusia dan penyelundupan harus segera dihentikan, karena para korban pulang ke rumah dengan kondisi sakit fisik, mental dan sosial. Perdagangan manusia dan penyelundupan bahkan dianggap lebih berbahaya dibandingkan penggunaan narkoba, karena jumlah korbannya cenderung meningkat dan terus diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Dampak penyakit sosiopat ini dapat berdampak pada keselamatan masyarakat. Situasi yang tidak dapat diterima oleh masyarakat seperti menjadi gila atau mengidap penyakit menular seperti HIV/AIDS sudah tidak lagi menguntungkan bagi korbannya sehingga merugikan masa depan bangsa.

Kegiatan perdagangan dan penyelundupan manusia ini sudah parah, hal ini disebabkan karena kurang ketatnya pemeriksaan sehingga dapat terjadinya kegiatan perdagangan dan penyelundupan manusia di daerah perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah ini, seperti koordinasi antara pemerintah di

tingkat desa, kabupaten, dan kota. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini haruslah sangat terstruktur karena melibatkan beberapa bidang, seperti masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Di antara maraknya permasalahan perdagangan manusia dan penyelundupan namun pemerintah daerah masih sulit untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan ini, justru pemerintah pusat telah yang diinginkan untuk mengatasi masalah ini dikarenakan biaya berada di pemerintah pusat dikarenakan devisa para TKI yang berada di pemerintah pusat. Namun jika kepolisian daerah Sumatera Utara kekurangan dana untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia ini mereka akan mengambil jalan untuk bekerjasama dengan LSM-LSM.

Selain itu adapun tantangan lainnya yaitu peraturan mengenai perdagangan manusia ini yang belum jelas ketentuannya atau tanggung jawab dari pemerintah daerah. Pengiriman orang ke negara tetangga merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat, namun belum ditemukannya peraturan yang menegaskan siapa yang mengirim tenaga kerja tersebut ke negara tempat ia akan bekerja. adapun PPTKIS yang mengirim TKI tanpa persetujuan yang yang jelas maka usaha tersebut ataupun orang yang melakukan tindakan tersebut akan dikenai sanksi, tetapi yang terjadi selama ini jika ada yang melanggar pelakunya dibiarkan begitu saja, hanya usahanya saja yang ditutup.

Untuk meminimalisir perdagangan manusia ini negara seharusnya lebih memperhatikan lagi dan meningkatkan lagi kinerja dari TKI. dikarenakan jika kinerja TKI tersebut kurang optimal maka akan meningkatkan saingan dan menyangkut harga diri bangsa. jika banyak dari TKI yang kinerjanya tidak optimal yang dikirim ke Malaysia maka itu juga menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadikan manusia tersebut menjadi bahan perdagangan.

Untuk mengatasi atau meminimalisir perdagangan manusia ini diperlukan juga kerjasama antar Malaysia dan Indonesia untuk melindungi TKI yang dikirim ke Malaysia. penempatan tenaga kerja di Malaysia juga harus government to government bukan antar individu atau secara ilegal. kerjasama ini berkaitan dengan pemahaman peraturan antara Indonesia dan Malaysia. warga negara Malaysia kebanyakan tidak ingin menjadi tenaga kerja kasar, tetapi Malaysia butuh tenaga kerja kasar dengan upah yang murah.

Rusaknya sistem rekrutmen pengiriman TKI ke Malaysia dikarenakan awalnya PPTKIS mengirim TKI secara resmi namun malah di akhir menggunakan cara yang ilegal. melalui cara pengiriman yang ilegal seperti ini yang menyebabkan banyak terjadinya kerugian bagi tenaga kerja karena tidak memiliki perlindungan yang jelas apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan.

namun bila pengiriman dilakukan melalui jalur yang jelas atau resmi maka akan mudah diketahui apabila terjadi sesuatu hal yang tidak wajar pada TKI tersebut.

KESIMPULAN

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif ekonomi, khususnya terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia dari perdagangan dan penyelundupan manusia, memiliki sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Pekerja migran Indonesia di Malaysia merupakan kelompok yang signifikan, dan masalah perlindungan hak mereka merupakan isu penting. Bahwa perdagangan orang dan penyelundupan orang harus segera dihentikan mengingat korban pulang dengan membawa penyakit fisik, mental dan sosial. Kegiatan perdagangan orang dan penyelundupan orang bahkan dianggap lebih berbahaya dari penggunaan narkoba karena jumlah korban yang cenderung meningkat dan terus diperjualbelikan untuk mendapatkan margin keuntungan. Efek yang ditimbulkan dari penyakit sosial ini berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, G. A. (September 2022). Perspektif Hukum Internasional Mengenai Kerjasama Bilateral. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 269-276.
- Marsyalindi, A. (2019). Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Persoalan TKI Ilegal Tahun 2004-2011. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 176-196.
- Syahputra, M. (2022). Tantangan dan Strategi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia . *Jurnal Politik dan Keamanan*, 221-236.
- Wangke, H. (Desember 2017). Kerja Sama Indonesia - Malaysia dalam Pengelolaan Pembatasan di Kalimantan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gusnita, C. (2016). kerjasama indonesia-malaysia dalam penegakan hukum kejahatan
- Miswanto, & Arfa, D. (2016, Juni). PERDAGANGAN DAN PENYELUNDUPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA. *JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya.*, 18(1), 1-11.
- Dr. H. Zainal. A. (2016). Peluang dan Tantangan Mea: Kerjasama Pendidikan Indonesia di Kawasan ASEAN. Ri'ayah, Vol. 01.
- Al-Kharitza. R. H. (2014). Kerjasama Ekonomi Bilateral Indonesia dan Malaysia dalam Sektor Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2006-2010. *Global & Policy*. Vol. 02.
- Miswanto. , & Desmayeti. A. (2016). Perdagangan dan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. *Jurnal Antropologi*. Vol. 18.
- Hardi. A., Suci. C., Dianita. M. A., Dkk. (2022). Analisis Diplomasi Indonesia-Malaysia dalam Menangani Praktek Penyelundupan Pekerja Ilegal di Perbatasan Aruk Kalimantan Barat. *Journal of International Relations*. Vol. 01.
- Muhammad. Z., Syahrul. A. L., Dkk. Penyelundupan Manusia di Perbatasan Maritim Malaysia-Indonesia: Studi Kasus di Pulau Bengkalis. *Asean People Journal*. Vol. 01.
- Yasmirah. M. S., Ahmad. Z. S., Dkk. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia ke Indonesia. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 04.